

Pemkab Bekasi akan Bangun Banyak Hidran di Permukiman Padat

BEKASI (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan membangun banyak hidran di kawasan permukiman untuk memudahkan sekaligus mempercepat proses pemadaman api ketika personel kesulitan mendapatkan sumber air saat bertugas. Hal itu merespon puluhan insiden kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang Januari-Juni 2022.

"Itu rencana kita, jadi nanti hidran akan dibangun di titik-titik permukiman yang jauh dari sumber air," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi, Hasan Basri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/8).

Dia mengatakan, rencana pembangunan hidran berdasarkan hasil kajian serta pengalaman personel pemadam damkar saat menangani peristiwa kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. "Sejumlah kendala yang dihadapi personel ketika bertugas, terkadang lalu lintas macet atau padat dan ketika personel membutuhkan air untuk pema-

daman tapi sumber air jauh," kata Hasan.

Menurut Hasan, petugas sudah berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi untuk merealisasikan pembangunan titik sambungan persediaan air bawah tanah tersebut. "Kami sudah ke PDAM Tirta Bhagasasi, mereka juga merespon baik, tinggal kajian teknis sekaligus menentukan titik-titik hidran dimana saja," katanya.

Hasan mengaku, pembangunan hidran di permukiman padat penduduk bertujuan untuk meminimalisasi kerusakan parah akibat insiden kebakaran. Pihaknya mencatat sejak Januari-Juni 2022 telah terjadi 67 peristiwa kebakaran, baik di lingkungan rumah tinggal, ruko, gudang, rumah sakit, klinik, pabrik, sekolah, pusat perbelanjaan, gardu listrik, pabrik, dan alang-alang.

"Ya memang permukiman padat penduduk paling banyak terjadi kebakaran selama enam bulan ini, paling banyak di Tambun Utara ada lima kejadian," kata Hasan. ● yan

Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi Masih Tinggi

BEKASI (IM) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat 73 kasus kekerasan pada anak terjadi di wilayah Kota Bekasi sepanjang Januari hingga Juni 2022.

Sub Koordinator DP3A Kota Bekasi, Linda Ariesta mengatakan, kekerasan terhadap anak terjadi dalam 16 kategori. Kasus pelecehan seksual mendominasi. "Ada 73 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada Januari sampai Juni 2022, masuk dalam 16 kategori jenis kasus kekerasan," kata Linda dalam keterangannya, Kamis (4/8).

Dari puluhan kasus tersebut, terbanyak tercatat jenis kekerasan pelecehan seksual. Kemudian diikuti dengan pelecehan terhadap anak. "Pelecehan seksual kasus terbanyak tercatat dengan 17 kasus diikuti dengan persetubuhan sebanyak 14 kasus," jelasnya.

Kasus terbanyak ketiga

masih seputaran dengan kekerasan seksual dengan jenis kategori persetubuhan terhadap anak. Jumlahnya mencapai 12 kasus. "Jenis kategori persetubuhan terhadap anak dengan jumlah kasus 12," tuturnya.

Kasus yang lainnya meliputi adanya laporan kekerasan psikis sebanyak tujuh orang dan diikuti kekerasan fisik sebanyak enam kasus. Sebanyak enam kasus lainnya juga berupa permasalahan hak asuh anak kemudian dengan jenis kasus penelantaran terhadap anak tercatat 4 kasus.

"Kasus lainnya, yakni masing-masing berjumlah 2 kasus, di antaranya penculikan, bullying, dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) selama Januari hingga Juni 2022," ungkapnya.

Catatan kasus paling rendah yakni dengan jenis kategori kasus pencurian pada anak. Kasus pencurian anak tercatat DP3A dengan jumlah 1 kasus. ● yan



PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL DI JAKARTA

Petugas menyuntikkan vaksin campak rubella kepada seorang anak dalam Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTA) III Tanah Abang, Jakarta, Kamis (4/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan sebanyak 715.782 anak berusia 9-59 bulan dapat diimunisasi saat pelaksanaan BIAN pada Agustus 2022.

Tarif Integrasi Antarmoda di DKI Segera Diterapkan

JAKARTA (IM) - Tarif terintegrasi antarmoda di DKI Jakarta melalui sistem tiket JakLingko siap diterapkan dan dinikmati oleh pengguna transportasi umum pada pertengahan Agustus ini.

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia, Muhamad Kamaluddin mengatakan, tarif perpindahan antarangkutan umum sebesar Rp10 ribu tinggal menunggu payung hukum dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui keputusan gubernur (keppub).

"Jadi nanti bukan sekadar uji coba lagi, dari Pemprov sendiri sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD kepada Pak Gubernur untuk tarif integrasi ini. Targetnya pertengahan bulan Agustus ini diluncurkan," kata Kamaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/8).

Kamaluddin menjelaskan, integrasi tarif untuk moda Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta akan berlaku maksimal Rp 10 ribu untuk perjalanan maksimal tiga jam. Namun jika hanya menggunakan satu jenis moda saja, pengguna tetap dikenakan tarif normal sesuai operator. Pengguna transportasi juga bisa merencanakan perjalanan sekaligus membayar tiket melalui aplikasi dan kartu

JakLingko yang juga segera diluncurkan. Aplikasi JakLingko dapat diunduh melalui sistem berbasis android (*playstore*) maupun iOS (*appstore*).

Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memilih opsi transportasi yang tercepat, maupun yang terjangkau. Penerapan tarif integrasi maksimal Rp10 ribu ini akan berlaku selama enam bulan ke depan, kemudian dievaluasi kembali.

JakLingko memproyeksi dengan tarif yang lebih terjangkau ini, jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum akan meningkat hingga 16 persen di setiap moda transportasi dalam satu tahun pertama.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, sebanyak 60 persen warga ibu kota menggunakan lebih dari satu moda transportasi, 20 persen lebih menggunakan tiga moda dan sisanya menggunakan satu moda.

Apalagi, 98 persen wilayah Jakarta sudah dapat dijangkau oleh angkutan umum, meskipun harus berpindah moda. "Kami optimis sesuai dengan proyeksi ini, akan menarik minat banyak pengguna, dan juga mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum," kata Kamaluddin. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PAMERAN FILATELI TINGKAT DUNIA

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) Fadli Zon (kanan) melihat koleksi kartu pos masa lalu pada Pameran Filateli Tingkat Dunia (World Stamp Championship - Indonesia 2022) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (4/8). Pameran prangko yang diikuti 61 negara dan menghadirkan 506 koleksi dengan 2084 frame tersebut mengangkat tema "Enjoy Philately, Make Recovery Together, Better and Stronger", dan berlangsung 4-9 Agustus 2022.

ANIES UBAH NAMA RSUD

Ketua DPRD DKI: Warga Miskin Butuh Solusi, Bukan Ganti Nama

Seharusnya Gubernur Anies memunculkan terobosan-terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat, Alih-alih terasa langsung, kebijakan Anies melenceng dan hanya berkutat pada pergantian nama, kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengkritik perubahan nama sejumlah Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) DKI menjadi 'Rumah Sehat' oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, terobosan yang dimunculkan tidak begitu

berdampak langsung pada masyarakat.

"Seharusnya memunculkan terobosan-terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat," kata Prasetyo dalam keterangannya, dikutip, Kamis (4/8).

Alih-alih terasa langsung, dia menyebut jika kebijakan Anies melenceng dan hanya berkutat pada pergantian nama. Padahal, dia menilai ada banyak sekali masalah yang masih terjadi di DKI Jakarta.

"Kemarin nama jalan sekarang rumah sakit. Stop deh bikin kebijakan ngawur,"

ujarnya.

Dia menyebut, masalah utama yang bisa diselesaikan di Jakarta harusnya dimulai dari persentase angka kemiskinan yang terus merangkak naik, selain dari permasalahan kampung kumuh di tengah kota. Dia, membandingkan masalah itu dengan kota-kota lainnya seperti Tanah Tinggi dan Johar.

"Ini Jakarta lho. Lihat tuh Tanah Tinggi, terus Johar. Mereka itu (penduduk miskin) perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program-program yang baik, bukan ganti-ganti nama begitu, itu nggak dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Dengan adanya pergantian nama jalan itu, dia juga mengaku gerah dengan penamaan 'Rumah Sehat' yang digadang-gadang Anies mengganti nama Rumah Sakit. Terlebih, saat semua orang dinilainya hanya mengetahui rumah sakit sebagai tempat berobat.

"Lagi pula penamaan rumah sakit sudah tertera jelas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jadi memang aturannya di Pasal 1 jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit kemana sih larinya, ya ke rumah sakit," ujarnya.

Pertanyaan

Sementara Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak juga mempertanyakan urgensi dari perubahan nama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terhadap lima rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjadi rumah sakit.

"Kalau mau dibikin perubahan nama itu yang harus diubah itu kondisi dalamnya. Bukan namanya. Sekarang apa yang diharapkan dengan perubahan itu menjadi rumah sakit?" kata Gilbert kala dikonfirmasi di Jakarta,

Kamis (4/8).

Gilbert menyebutkan, tak seharusnya ada perubahan nama RS menjadi rumah sehat, yang akhirnya akan menimbulkan kerancuan.

Apalagi, sambung dia, tata nama tersebut sudah ada sejak puluhan tahun. Dia menyinggung, RS sudah dikenal sebagai rumah sakit, bukannya rumah sehat.

Karena itu, Gilbert mengingatkan Anies untuk tidak sembarangan dalam mengganti nama tanpa mendiskusikannya dengan ahli tata bahasa. Dia juga meminta Pemprov DKI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Artinya, DKI tidak boleh sembarangan menggantinya tanpa membicarakan hal ini dengan ahli tata bahasa dan meminta pendapat dari Kemenkes," tutur Gilbert.

Perubahan nama akibat kebijakan Anies itu, tuding Gilbert, bisa menimbulkan kerancuan.

Akhirnya akan menimbulkan ambiguitas dalam mengartikan kata dari bahasa asing untuk rumah sakit.

"Akhirnya mengartikan bahasa Inggris hospital akan menjadi dua arti, rumah sehat untuk RSUD DKI dan rumah sakit buat RS di luar RSUD DKI yang keduanya mempunyai arti yang berbeda," kata Anies.

Kondisi itu akan membingungkan mereka yang sekolah. "Ini sama seperti arti rumah singgah yang berbeda dari rumah tinggal," ujar Gilbert. ● yan

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) PT. MD GRAHA UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan), yang terakHIR diantarkannya tanggal 03 Agustus 2022, telah memuat: - Menyetujui Penurunan Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan; Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal terdapat keberatan dari kreditur Perseroan terhadap Penurunan Modal, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera di bawah ini dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 05 Agustus 2022
PT. MD GRAHA UTAMA
MD Place Tower 1
Jl. Setiabudi Selatan No.7 Kel. Setiabudi,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyetaraan yang semula "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyetaraan adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyetaraan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)";
- Perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyetaraan yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi";
- Perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyetaraan yang semula "Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)"; dan
- Perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi".

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh pada Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyetaraan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 5 Agustus 2022
Manajer Investasi
REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PENGGANTIAN ISTILAH RSUD DI JAKARTA

Pengendara sepeda motor melintas di depan Rumah Sehat Untuk Jakarta (RSUD) Tarakan, Cideng, Jakarta, Kamis (4/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengganti istilah rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat Untuk Jakarta dan akan menerapkan pada 31 rumah sakit milik pemerintah yang ada di Ibukota untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap rumah sakit.